

PERUBAHAN KEDUA – PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 – PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RT/RW		
2025		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 4, BD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 4, 5 HLM		
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RT/RW		
ABSTRAK	-	Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan tunjangan lainnya yang sah antara lain tunjangan hari raya dan tunjangan tiga belas sebagai penghargaan atas kinerja dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lain yang sah. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW, belum mengatur tentang tunjangan hari raya dan tunjangan tiga belas untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP 11 Tahun 2021.
	-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atas Pasal 9, Pasal 11, penambahan Pasal 13 A, 13 B dan 13 C, perubahan atas Pasal 14, dan penambahan atas Pasal 14 A, Pasal 14 B dan Pasal 14 C.
CATATAN	:	- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025